

PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

M. Nasar

Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research intends to find out and analyze: 1) planning process, action, evaluation, and accountability of the village fund at Marawola district, Sigi regency; and 2) village allocation funds program in economic development at Marawola district, Sigi regency. This was a qualitative descriptive research with 15 informants selected through purposive sampling. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion. The results show that: 1) planning process, action, and the village fund evaluation at Tinggede, Bomba, and Binangga villages run well based on the participatory development concept characterized by participatory, responsive, and transparency principles. An accountability of village allocation funds technically and administratively were effective, however in financial administration was not effective; and 2) the village fund management at the three villages in hal fulfilled the basic needs.

Keywords: *Village Allocation Funds Program; Economic Development; Participatory Development*

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberi kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat

desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya tentu memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah pula karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan

ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam "kegotong-royongan" yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Implementasi otonomi daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640 SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk desa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana Pembangunan Desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Sidik, 2002:8).

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa adalah: 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan 4) mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Adapun program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi adalah: 1) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Biaya operasional BPD; 3) Tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa; 4) Bantuan modal usaha POKMAS; 5) Bantuan biaya operasional LKMD; 6) Bantuan operasional PKK; 7) Bantuan operasional posyandu; 8) Bantuan

pengembangan sosial budaya, keagamaan, dan pembinaan generasi muda; dan 9) Bantuan penyaluran raskin desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini melalui pembangunan fisik dan non fisik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban dana Desa di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi; dan 2) bagaimana program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi; dan 2) program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan pada Studi Perencanaan Wilayah Pedesaan khususnya yang berhubungan dengan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penelitian yang relevan.

Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam meningkatkan program Alokasi Dana Desa (ADD) pada masa yang akan datang dengan melihat pada hasil identifikasi dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

(ADD) serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi desa.

I. METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk permasalahannya, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Subana (2010: 260) mengatakan: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (saat penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya". Pada saat penelitian dilaksanakan, penelitian deskriptif cenderung tidak melakukan tindakan ataupun pengontrolan, perlakuan pada subyek penelitian.

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan pengujian secara matematik statistik, tetapi hanya dianalisis berdasarkan analisis penelitisebagai instrumen utama dalam penelitian. Peneliti menguraikan data dengan cara memberikan pengertian, penjelasan dan penaksiran pada data yang dianalisis. (Sugiyono 2007:11). Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data yang sebenarnya), data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sigi dan secara purposive ditetapkan pada Kecamatan Marawola dengan pertimbangan bahwa dari 15 (lima belas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawola memiliki karakteristik yang berbeda dengan kecamatan lainnya yaitu terdapat beberapa desa yang terletak pada wilayah zona pengembangan ekonomi, selain itu pertimbangan Kecamatan Marawola

adalah jumlah penduduknya terbanyak kedua setelah Kecamatan Sigi Biromaru.

Setelah Kecamatan Marawola ditetapkan selanjutnya secara purposive pula menetapkan desa-desa yang dijadikan lokasi penelitian, yaitu Desa Tinggede, Desa Bomba dan Desa Binangga, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Desa Binangga adalah desa yang terletak di Ibukota Kecamatan; 2) Desa Tinggede merupakan desa terpadat penduduknya dibandingkan dengan desa lainnya; 3) Desa Bomba merupakan desa yang kurang penduduknya; dan 4) pada desa-desa tersebut belum pernah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian (\pm) 3 (tiga) bulan, dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh penulis langsung dari obyek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini; dan 2) Data Sekunder, adalah data penunjang yang didapat melalui naskah tertulis, atau dokumen seperti beberapa buku dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian ini serta data Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari RKA, Musrembang, dan laporan pertanggungjawaban desa.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 1) Observasi (pengamatan); 2) Pedoman Wawancara (daftar pertanyaan); dan 3) Kepustakaan (dokumentasi).

Informan Penelitian

Menurut Purwanto (2007:37) informan adalah unit analisis, atau individu yang menjadi target penelitian. Sedangkan menurut Nazir (2009:172), informasi adalah kumpulan dari individu, kejadian atas segala sesuatu dengan kualitas serta ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan.

Keseluruhan informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dalam arti dipilih secara sengaja dengan kriteria pihak yang diwawancarai dianggap mengetahui informasi dengan baik tentang Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Adapun rincian informan sebagai berikut: Kepala Desa (3 orang), Sekretaris Desa (3 orang), Ketua BPD (3 orang), Tokoh Masyarakat (3 orang), dan Tokoh Adat (3 orang) sehingga total informan sebanyak 15 orang.

Defenisi Operasionalisasi Konsep

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto,2008:33). Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan defenisi operasional sebagai berikut: 1) Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk Desa; dan 2) Pengembangan ekonomi adalah suatu kegiatan menambah, meningkatkan dan memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model Model Miles and Huberman (Sugiono, 2010:92) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Kecamatan Marawola merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi yang terletak pada $0^{\circ}55'27''-1^{\circ}00'37''\text{LS}$ dan $119^{\circ}49'27''-119^{\circ}52'57''\text{BT}$ yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: a) sebelah Utara, berbatasan wilayah Kota Palu; b) sebelah Timur, berbatasan Kecamatan Dolo dan Kecamatan Sigi Biromaru; c) sebelah Selatan, berbatasan Kecamatan Dolo Barat; dan d) sebelah Barat, berbatasan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat.

Kecamatan Marawola pada umumnya merupakan daerah dataran (sekitar 90%), dan berada pada sepanjang sebelah barat aliran Sungai Palu yang terletak pada ketinggian 21-139 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Marawola sebesar 50,45 Km², yang terbagi dalam 11 (sebelas) desa. Berdasarkan data Kabupaten Sigi (2014), jumlah penduduk Desa Bomba 561 jiwa, Desa Tinggede 6.323 jiwa, dan Desa Binangga 2.690 jiwa.

Pembahasan

Perencanaan

Perencanaan program ADD di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dilaksanakan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat dan menekankan pada proses motivasi berpartisipasi dalam

pembangunan desa. Program dan kegiatan yang dibiayai ADD yang direncanakan untuk pengembangan ekonomi di Kecamatan Marawola sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing desa yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Hasil penelitian, menggambarkan bahwa peningkatan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana desa dengan membangun BUM Desa merupakan salah satu program dan kegiatan yang dibiayai ADD di Desa yang direncanakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Semakin baik keadaan infrastruktur sarana dan prasarana desa maka kegiatan perekonomian masyarakat semakin bergairah karena adanya dukungan infrastruktur yang memadai.

Pada prinsipnya penggunaan ADD di Kecamatan Marawola terbagi menjadi 2 (dua) pemanfaatan, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa. Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah Desa.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD yang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi di Kecamatan Marawola sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa

dengan berbagai macam bentuk program atau kegiatan.

Hasil penelitian memberikan penjelasan, bahwa pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di tingkat desa yang anggarannya dibiayai dari ADD telah berjalan dengan baik karena penggunaan ADD benar-benar diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya dan semuanya terealisasi dengan baik sesuai dengan peruntukannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pada pelaksanaan ADD untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Tinggede, Desa Bomba dan Desa Binangga Kecamatan Marawola senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban ADD

Prinsip pertanggungjawaban ADD secara bertahap sudah diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Manfaat program Alokasi Dana Desa dalam pengembangan ekonomi

Tuntutan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kehidupan ekonominya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pengembangan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Salah satu cara dari memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan pemberian Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah memberikan sedikit jawaban karena sebagian dari dana tersebut adalah untuk pemberdayaan baik fisik dan non fisik yaitu pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk melihat bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Kecamatan Marawola, maka dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Kebebasan Mobilitas Masyarakat

Kebebasan mobilitas masyarakat yaitu kemampuan masyarakat di Kecamatan Marawola untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya baik di dalam maupun ke luar daerah kapan saja diinginkan dan tidak tergantung pada orang lain. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Marawola untuk bepergian ke luar desa kapan saja dan tidak tergantung pada orang lain. Berkaitan pengembangan ekonomi masyarakat

Kebebasan mobilitas merupakan salah satu indikator untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama kebebasan mobilitas disini adalah melihat bagaimana masyarakat untuk mampu melakukan kegiatan dan beraktivitas sehari-hari dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

2. Kemampuan Membeli Komoditas

Kemampuan membeli komoditas seperti barang-barang kebutuhan pokok/dasar untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya kapan saja dibutuhkan telah tersedia di desa. Walaupun tidak tersedia kebutuhan tersebut, namun masyarakat mempunyai kemampuan membeli dari luar desa

3. Jaminan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Keluarga

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu kemampuan masyarakat desa di Kecamatan Marawola untuk memiliki jaminan ekonomi, pendidikan dan aset lain yang menghasilkan terhadap kelangsungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memiliki tanah, rumah, tabungan, pendidikan dan aset produktif yang menghasilkan.

Hasil penelitian, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Marawola sudah mampu untuk memiliki aset pribadi seperti rumah dan tanah. Hal ini terbukti bahwa semua masyarakat telah memiliki rumah walaupun masih ada sebagian yang sangat sederhana, ditambah juga memiliki kebun dan sawah yang mereka dapatkan dari keluarganya secara turun temurun.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Proses perencanaan dan evaluasi dana desa pada Desa Tinggede, Bomba dan Desa Binangga telah melaksanakan

konsep pembangunan partisipatif yang ditandai dengan partisipatif, responsif, dan transparansi. Mengenai pertanggung jawaban secara teknis dan administrasi telah terpenuhi namun belum sepenuhnya di pahami.

2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) pada Desa Tinggede, Desa Bomba dan Desa Binangga dalam pengembangan ekonomi telah dirasakan dengan adanya pengakuan informan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Marawola maka disarankan adanya pelatihan bagi perangkat desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban/SPJ).

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nazir, Moh., 2009. *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sigi.
- Purwanto, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Gava Media, Yogyakarta

- Subana, 2010. *Dasar-Dasar Penelitian dan Statistika Untuk Guru*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Keempat belas, CV. Alfabeta, Bandung